

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asmat Propinsi Papua Selatan

Yohanis Pombai¹, Fariah Ruhana², Sutiyo³

¹Pemerintah Daerah kabupaten Asmat

^{2,3}Institut Pemerintahan dalam Negeri

Email : yohanispombai@gmail.com

Abstract

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan sampai di pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Reformasi struktural diperlukan untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi dan daya saing yang didukung dengan refofmasi fiskal. Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan bertanggungjawab penuh mampu mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, termasuk mengelola potensi dan mengelola keuangan daerahnya. Salah satu upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk perkembangan adalah ke meningkatkan dan mengeksplorasi setiap potensi itu ada di dalam setiap daerah melalui pajak daerah. Kajian ini bertujuan untuk strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Asmat Propinsi Papua Selatan dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha menemukan pemahaman makna berdasarkan fakta atau fakta yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mewawancara dan pengumpulan data pada pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat. Strategi untuk meningkatkan target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Asmat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia di daerah Pendapatan Agen dan itu kekurangan dari kualitas infrastruktur dan fasilitas di dalam di setiap Distrik (kecamatan). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, bencana alam dan letak geografis, serta rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi ancaman lain dalam pemenuhan target pendapatan asli daerah. Melihat sejumlah tantangan dan kendala tersebut, maka perlu ditindaklanjuti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat dalam masa depan.

Kata kunci: *di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat, pajak, pendapatan daerah*

Abstract

Regional autonomy and decentralization are tools to achieve the goals of the state, namely equal distribution of welfare to all corners of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Structural reform is needed to strengthen the economic foundation by utilizing demographic factors and competitiveness supported by fiscal reform. Even though it has shown positive performances, the implementation of fiscal decentralization is still faced with various challenges and is fully responsible for being able to regulate, manage and administer its regional government, including managing its potential and managing regional finances. One of the efforts to increase regional financial capacity for development is to increase and explore every potential that exists in each region

through local taxes. This study aims at a strategy to increase regional original income in Asmat Regency, South Papua Province in increasing regional tax revenue targets. To achieve this goal, this study uses a descriptive method, namely trying to find an understanding of meaning based on facts or facts that exist in the Asmat Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Therefore, the data collection technique used was by interviewing and collecting data on employees at the Asmat Regency Regional Financial and Asset Management Agency. The strategy for increasing the target of local tax revenues in Asmat Regency found in this study is tax intensification and extensification. However, there are still a number of challenges and obstacles in increasing regional tax revenues, such as the lack of quality human resources in the Agent Revenue area and the lack of quality infrastructure and facilities within each District (sub-district). In addition, low public awareness in paying local taxes, natural disasters and geographical location, as well as low mastery of information technology is another threat in meeting local revenue targets. Seeing a number of these challenges and obstacles, it is necessary to follow up at the Asmat Regency Regional Financial and Asset Management Agency in the future.

Keywords: *in the Asmat Regency Regional Financial and Asset Management Agency, taxes, regional income*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pembahasan tentang otonomi diterapkan di sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih berlangsung dan mendapatkan perhatian yang serius terbukti dari perkembangan peraturan yang mengatur tentang pemerintah daerah itu saat ini sudah diperbaiki dan melahirkan Konstitusi Tidak. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan Undang-Undang Program baru ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan melayani, Pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Di dalam Selain itu, melalui otonomi ini diharapkan daerah mampu mengatur, mengelola dan mengatur pemerintah daerah sendiri dengan bagus, termasuk mengelola potensi daerah dan mengelola keuangan daerah sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, lalu dipaksakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang untuk memungut pajak dan retribusi daerah tentu saja Menjadi ciri Hal yang utama adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber keuangannya sendiri, terutama pajak dan retribusi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Bagian Kelima ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan daerah lainnya yang sah. Salah satu upaya peningkatan kemampuan di bidang pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah dengan meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di setiap daerah melalui pajak daerah. Upaya tersebut telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dengan selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak lokal. Namun tingkat realisasi target berupa pajak daerah dan pendapatan asli daerah belum mencapai target yang dihasilkan secara optimal.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini besifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung fokus pada landasan teori. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode penelitian Kualitatif deskriptif, dikarenakan peneliti dalam tesis ini melakukan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena yang akan di teliti oleh penelitian yang akan di lakukan di Pemeritah Kabupaten Asmat, Propinsi Papua Selatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di

Kabupaten Asmat. Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang Peningkata Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asmat, Propinsi Papua Selatan.

Sumber Data

Data Yang Diperlukan

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005:55). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak atau pejabat yang terkait dan dianggap berkompeten dalam memberikan jawaban dan penjelasan terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan adalah penjelasan atau jawaban dari informan yang dalam hal ini pejabat-pejabat terkait yang relevan memberikan jawaban terkait Peningkata Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asmat.

Informan dan Cara Menentukannya

Informan adalah pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Rusidi (2006) mengartikan informan adalah sumber data primer yang mampu memberikan informasi mengenai diri/keadaan orang lain, atau memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya.

Moleong (2012:132), mengatakan bahwa informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian.

Kuswarno (2013:60-61), mengatakan bahwa kriteria yang dijadikan acuan dalam memilih informan dalam penelitian

Instrument Penelitian dan Teknik Analisi Data

Instrumen Penelitian

Berkenaan dengan instrument penelitian, Moleong (2009:9) mengemukakan pendapatnya bahwa : Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika menggunakan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrument utama dalam penelitian, dimana peneliti secara langsung hadir ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan mencatat data atau informasi yang diperlukan, serta melakukan observasi langsung. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula pedoman wawancara (daftar pertanyaan untuk wawancara).

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Asmat dapat diketahui dengan melakukan dengan analisa SWOT:

IFAS EFAS	S(Strength) Tentukan Faktor-faktor kekuatan internal	Strategi WT: Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
O(Opportunity) tentukan faktor-faktor peluang eksternal	Strategi SO: ciptakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi peluang	Strategi WO : ciptakan strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
T (threat) tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST: ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT : ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data merupakan tahapan akhir dari teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan sambil melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kabupaten asmat sebagai penyelenggara pemerintahan yang harus mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat kabupaten asmat. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang di peroleh melalui penelitian yang di lakukan yaitu data responden dan data penelitian mengenai faktor-faktor apa yang menghambat penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten asmat.

Penelitian berlangsung pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan November tahun 2022. Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara semi terbuka yang dilakukan secara mendalam dan terbuka guna mendapatkan informasi dan data secara langsung. Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi untuk mengetahui lebih dalam dan jelas.

Pada sub bab hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menguraikan dua elemen utama hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan pemungutan PAD di Kabupaten Asmat Propinsi Papua Selatan? (2) Bagaimana strategi BPKAD dalam peningkatan PAD di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan? Dan tujuannya adalah (1) Untuk mengetahui proses pemungutan PAD di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan,(2) Untuk menentukan strategi yang diperlukan BPKAD dalam meningkatkan PAD.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah harus tunduk pada Undang-Undang ini. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan adanya Perda ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari terbatasnya data PAD yang ada. Demikian juga perkataan yang berkaitan dengan Pajak Daerah secara sistematis pada waktu tertentu, keadaan seperti ini tentu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan karena tidak didukung dengan data yang lengkap dan mudah diakses oleh masing-masing pihak yang mengeluarkannya, sehingga untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada tidak dapat diketahui dengan pasti. Lemahnya penanganan data ini akan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan, khususnya di meningkatkan pendapatan di sektor pajak daerah, hal ini karena lemahnya koordinasi antar instansi pengelola PAD. Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat saat ini belum sepenuhnya valid dan masih banyak kekurangan yang belum tersedia.

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan bagian terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan. Konsep Sumber Daya Manusia menjadi utuh dan utuh dalam menjalankan fungsi lembaga melibatkan secara aktif Sumber Daya Manusia dalam lembaga.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya.

Terkait dengan pelaksanaan administrasi wajib pajak, ketersediaan anggaran/sumber daya keuangan sebagai faktor pendorong sekaligus faktor pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sangat besar. Ketersediaan anggaran ini akan sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik pembiayaan rutin pegawai dan alat tulis kantor (ATK) maupun pembiayaan proyek yang terkait dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat. Besar kecilnya anggaran ini akan sangat tergantung dari besarnya pendapatan daerah kabupaten asmat secara keseluruhan, maupun yang bersumber dari PAD juga dari Pemerintah Pusat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat merupakan badan baru yang sebelumnya merupakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asmat. Oleh karena itu bidang penerimaan menjadi dasar koordinasi berbagai instansi (SKPD) dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sebagai pengelola pendapatan daerah, bidang pendapatan telah menjalankan tugasnya selama ini sebagai sektor yang memungut pajak dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asmat telah melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian berbagai objek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, BPKAD juga telah menghitung dan menetapkan pengenaan pungutan pajak di pedesaan dan perkotaan berdasarkan letak kawasan dan luas kawasan yang dimanfaatkan.

Potensi Pajak Daerah yang tidak dicatat dengan baik berdampak negatif terhadap penetapan target Pajak Daerah yang selama ini belum didasarkan pada potensi Pajak Daerah di lapangan karena data mengenai potensi Pajak Daerah belum tersedia. Tekad target selalu berdasarkan realisasi besarnya tuggakan, sehingga penerimaan Pajak Daerah selama ini belum mencerminkan penerimaan yang sebenarnya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat yang mengatakan bahwa potensi Pajak Daerah masih jauh lebih besar dari target dan realisasi selama ini. Oleh karena itu, pendataan potensi sumber wajib pajak merupakan langkah strategis sebagai upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Fokus utama dari strategi ini adalah mewujudkan sumber penerimaan riil di sektor Pajak Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini, strategi yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah adalah dengan menggunakan strategi penguatan dan pengembangan kekuatan internal Badan organisasi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan pegawai pajak, peningkatan alokasi anggaran yang memadai dengan dukungan dari pihak legislatif yang secara penuh ingin mendukung program dan visi misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asmat dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah, serta struktur organisasi yang jelas. Melalui analisis SWOT ini juga dapat diperoleh faktor internal yang dapat dijadikan kelemahan. Faktor-faktor yang menjadi kelemahan adalah: Sumber daya manusia masih rendah kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program masih kurang, serta perilaku dan budaya organisasi masih kurang kontraproduktif..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Amin Silalahi, Gabriel Metodologi Penelitian dan Studi Kasus. (Sidoarjo:CV. Citramedia 2003).
- Ansoff, Igor (1965), Corporate Strategy McGraw Hill, New York.
- Apter, David. 1977. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES.
- Bambang Haryadi (2003), pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan
- Bangun, Wilson. 2012. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta: Erlangga
- Bryson, John. 2001. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Bryson, John M. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (Revised Edition). San Francisco, CA. : Jossey-Bass
- David Fred R (2012). Strategic Management :. Konsep Manajemen Strategi. Jakarta : Salemba Empat
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Puranto)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dale, Ernest. 1978. Management: Theory and Practice. Mc-Graw-Hill Kogakusha, Ltd.
- Endaswara, Suwardi. 2003. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta
- Hariadi, Bambang. 2003. Strategi Manajemen. Malang: Banyumedia Publishing. 2001. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Isdijoso, B. 2002. "Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)". Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol. 6 No. 1.
- Kotler, K.(2009). Manajemen Pemasaran 1. Edisi ketiga belas. Jakarta: Erlangga
- Mangkusubroto ,Guritno, 1995. Ekonomi Publik, BPFE UGM , Yogyakarta
- Mangkusubroto ,Guritno, 2001. Ekonomi Publik Edisi , BPFE UGM , Yogyakarta
- R.M Mac Iver, The web of government, The macmillan, New York, 1951 Hal 147-174
- Maleong, Lexy. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mulyadi (2001), pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Rusidi. 2008. „Ekspansi Kueri Dalam Sistem Temu Kembali Informasi bahasa Indonesia Menggunakan Peluang Bersyarat”, Tugas Akhir, IPB, Bogor.
- R.M Mac Iver, The web of government, The macmillan, New York, 1951 Hal 147-174
- Salusu, J., (2004). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Erlangga.
- Samsubar, Saleh. 2003. "Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia", Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis
- Simorangkir, Iskandar, Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik diIndonesia Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 316
- Suradinata, Ermaya. 2008. Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Dokumen Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2009, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

Sumber Lain

Sakip BPKAD Kabupaten Asmat 2021
Renstar BPKAD 2021 Kabupaten Asmat
www.asmatkab.go.id